

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, 2020, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, DJKN Kemenkeu
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Perdata*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Ahmad Ibrahim, 2010, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo
- Amsari, Feri. "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Ancaman terhadap Independensi Parlemen." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, Jakad Media Publishing
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- B. Harahap, 2019, *Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara* Jakarta, Sinar Grafika.
- B.N. Marbun, 2010, *Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Budi Juliardi dkk., 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Padang, Gita Lentera
- Choudhry, Sujit. 2006. *The Migration of Constitutional Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka
- Fahmi, Khairul. *Sistem Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2019.
- Frank Elkoury dan Etna Elkoury, 2003, *International Arbitration: Law and Practice*, New York, Juris Publishing
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138-143.

- Hoffmann, 1998, *Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Rajawali Pers
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly shiddiqie, 2016, *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Joni Emirzon, 2008, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- M. Isnaeni, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Montesquieu. 1989. *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Munir Fuady, 2004, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Natabaya, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum. Edisi I*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Philipus M. Hadjon. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Santoso, 2020, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia* Bandung, Alumni.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).
- Satjipto , Rahardjo, 2018, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soleman, M, 2022, *Penyelesaian Sengketa Partai Politik di Indonesia: Perspektif Hukum*. Yogyakarta, UGM .
- Suryatin, 2001, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Pradnya Paramita

Tushnet, Mark. 2015. *Why the Constitution Matters*. New Haven: Yale University Press.

Yahya Harahap. 2020. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2010.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2019

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal Skripsi Dan Karya Ilmiah Lainnya

A. A. Anshar dan B. Setiawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anggota DPRD yang Diberhentikan*," Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah 9, no. 3 (2023): 45-53.

Aan Marriansah, A. Zarkasi, dan Muhammad Amin. "*Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif*." Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 216-231.

Abdul Jamil. "*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)*." Jurnal Hukum Republika, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 91-110.

- Amande, Yuantoni Fidelico Brucel. "*Problematika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.*" (2018).
- Anang Dony Irawan, "*Hukum Partai Politik dan Pemilu,*" Jurnal Hukum dan Politik 3, no. 1 (2025): 1-50, diakses dari repository Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "*Permasalahan Aspek Formil Penyelesaian Sengketa.*" Jurnal Hukum Peratun Mahkamah Agung 3, no. 1 (2021): 30-50.
- Else Suhaimi. "*Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia.*" Jurnal Hukum Tri Pantang 7, no. 1 (2021): 27-51.
- Erinaldi. 2021. "*Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang Melakukan Tindak Pidana.*" Tesis, Universitas Islam Riau.
- Firdaus, Ahmad. *Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Anggota DPRD.* Medan: Universitas Sumatera Utara, 2025.
- Firmansyah, Yohanis. 2016. "*Pemberhentian Antarwaktu (Recall) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*" Jurnal Hukum 12, no. 2: 66.
- G. Malindir, "*Pelembagaan Partai Golkar Pasca Reformasi,*" Jurnal Politik dan Pemerintahan 6, no. 2 (2025): 112-130.
- Hidayah, DS. (2021). *Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota DPR dan DPRD.* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 11(3), 211–224.
- Hidayat, Taufik. "*Batasan Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Politik.*" Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 2 (2023): 110-130.
- Joes Wandi. "*Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.*" PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Muhammad Irfan Hilmy, dan Trian Marfiansyah. "*Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di di Indonesia.*" Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 101-113.Indonesia
- Nurhasanah, D. (2022). *Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.* Jurnal Hukum Caraka Justitia, 5(1), 43–54.
- Putra, AA. (2022). *Pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena Pindah Partai.* Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 4(2), 132–149.

- Ranah Research Journal. "*Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu dan Pergantian Antarwaktu.*" Ranah Research Journal 6, no. 4 (2024): 220-235.
- RH Nendissa, "*Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif,*" SASI Journal 5, no. 1 (2020): 15-30.
- Sari, M. (2019). *Hak Memberhentikan Anggota Dewan: Studi Kasus dan Analisis Yuridis.* Jurnal Penelitian Hukum dan Akuntabilitas Publik, 14(2), 101–118.
- SD Azahwa, "*Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai terhadap Good Government dan Clean Government,*" Law and Justice Journal 10, no. 2 (2025): 88-105.
- Supriyadi, Harri. *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW).* Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- TV Widyastuti, "*Literasi Hukum Partai Politik, Pasca Putusan MK untuk Penguatan Demokrasi,*" Jurnal Demokrasi dan Hukum 2, no. 4 (2025): 75-90.
- Winstar, Wulan Nur. 2025. "*Pemberhentian Anggota DPRD karena Pindah Partai Politik.*" Collegium Studiosum Journal 8, no. 1: 244-264. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1711>.
- Winstar, Yelia Nathassa, Reski, Ardiansah, dkk. "*Pemberhentian Anggota DPRD Karena Pindah Partai Politik dalam Perspektif Keadilan.*" Collegium Studiosum Journal 8, no. 1 (2025): 244-264.
- Zein, F., & Kurniawan, R. (2020). *Kontroversi Hak Recall Anggota DPR dan Implikasinya terhadap Demokrasi Representatif.* Jurnal Politik dan Hukum, 8(1), 25–40.

D. Internet/Web

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Fungsi dan Peran DPR," diakses 13 Mei 2025. No
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Konsultasi," diakses 13 Mei 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perbuatan Melawan Hukum".Wikipedia Indonesia, "Perbuatan Melawan Hukum," diakses 10 Mei 2025.
- SIP Law Firm, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata," diakses 11 Mei 2025.